**UPAYA INDONESIA DALAM MENINGKATKAN KUALITAS   
PENDIDIKAN UNTUK MENCAPAI TARGET SDGs**

**Maulana Malik Ibrahim**[[1]](#footnote-1)

***Abstact****: This study aims to provide an analysis and discussion of the efforts made by the Indonesian government in improving education according to the target of the Sustainable Development Goals. To analyze the problems in this research, the author uses a descriptive type of research, namely by describing the efforts made by Indonesia to achieve the target of the 4th SDGs. The analytical technique used is qualitative. The theory/concept used is the concept of public policy and the concept of education quality.* *The results of this study indicate that there are four program efforts carried out by the government as an effort to improve the quality of education according to the SDGs targets in the education sector in Indonesia, including policy efforts in the field of law, policy efforts to improve access to education, policy efforts for teaching and learning quality, and skills, vocational, and work ability policy efforts.*

***Keywords: Indonesia, SDGs, Quality of Education***

**Pendahuluan**

Pendidikan merupakan salah satu hak sosial yang dimiliki oleh setiap warga negara. Negara harus menjamin pemenuhan sosial setiap warga negaranya tanpa terkecuali. PBB menegaskan bahwa hak terkait pendidikan harus diwujudkan untuk menghormati HAM seperti yang tertera dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang ditetapkan pada 10 Desember 1948. (United Nation, 1948).

Kualitas pendidikan juga merupakan permasalahan global dan kesadaran dunia akan hal ini mendorong pergeseran fokus dari yang sebelumnya berfokus pada perluasan akses terhadap pendidikan seperti yang tercantum dalam MDGs (*Millennium Development Goals*) poin ke-2 menjadi peningkatan kualitas pendidikan itu sendiri seperti yang tercantum pada SDGs (*Sustainable Development Goals*) poin ke- 4. (Bruns et al., 2019).

Sebenarnya Indonesia telah menerapkan wajib 12 tahun sejak tahun 2013, yang tertera dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2013. Namun, jika melihat data UNDP tahun 2018 tentang peringkat IPM (Indeks Pengembangan Manusia), yang salah satu indikatornya mengukur terkait pendidikan, Indonesia berada di posisi yang kurang baik. Di antara 189 negara di dunia, Indonesia menempati urutan ke-111 dan tergolong sebagai *Medium Human Development* padahal Indonesia terbilang sudah merdeka terlebih dulu pada tahun 1945 tetapi sudah jauh tertinggal dari negara tetangga yang notabene lebih lambat merdeka namun telah berada dua tingkat di atas Indonesia sebagai negara dengan predikat *Very High Human Development* seperti Brunei Darussalam yang baru merdeka pada tahun 1984 di posisi ke-43 dan Singapura yang merdeka pada tahun 1965 di posisi ke-9 (UNDP, 2019).

Data-data di atas mengindikasikan bahwa adanya masalah yang terjadi pada sistem pendidikan di Indonesia. Hal tersebut terjadi dikarenakan Indonesia masih memiliki beberapa kendala terkait dengan kualitas pendidikan di negaranya. Diantaranya yakni permasalahan terkait kualitas guru dan tenaga pendidikan, permasalahan infrastruktur pendidikan, dan permasalahan vokasi serta kemampuan kerja.

Permasalahan pertama kualitas guru dan tenaga pendidikan, data dari The Global Education Monitoring Report yang dirilis oleh UNESCO tahun 2016 menyatakan bahwa kualitas guru yang ada di Indonesia menempati urutan ke-14 dari 14 negara berkembang di dunia. (UNESCO, 2016).

Selain itu, hasil dari Uji Kompetensi Guru pada tahun 2012-2015 masih tergolong rendah. Berikut datanya: (Kemendikbud, 2017)

Tabel 1 Perkembangan Nilai UKG Indonesia Tahun 2012-2015

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Uraian** | **Tahun Pelaksanaan UKG** | | | |
| **2012** | **2013** | **2014** | **2015** |
| Rerata Nilai UKG Guru Nasional | 45,85 | 47,84 | 48,95 | 56,77 |

Sumber: Kemendikbud

Permasalahan ke-2 adalah infrastruktur pendidikan. Menurut data dari kemendikbud pada tahun 2018-2019 masih terdapat banyak ruang-ruang kelas yang rusak di Indonesia. Berikut pemaparan datanya (Kemendikbud, 2019)

Tabel 2 Persentase Ruang Kelas Menurut Jenjang Pendidikan dan Kondisi 2018/2019

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Jenjang Pendidikan | Kondisi Ruang Kelas | | |
| Baik | Rusak Ringan/Sedang | Rusak Berat |
| SD | 27.40% | 63,92% | 8,68% |
| SMP | 31,28% | 61,32% | 7,4 % |
| SMA | 45,95% | 51,07% | 4,67% |

Sumber: Kemendikbud

Permasalahan ke-3 vokasi dan kemampuan kerja, permasalahan ini masih menjadi permasalahan bagi pendidikan di Indonesia khususnya dialami oleh para lulusan SMK, Permasalahan yang dihadapi SMK tersebut tidak bisa dilepaskan dari adanya kesenjangan kompetensi yang disebabkan oleh ketidaksesuaian antara supply dan demand tenaga kerja Industri pengolahan dan jasa pada tahun 2000 – 2015 untuk kompetensi tertentu. Ketidakseimbangan dalam bursa kerja menyebabkan menumpuknya lulusan program pendidikan pada tingkat tertentu, namun justru kekurangan pada segmen yang lainnya. Berikut datanya: (Kemendikbud, 2018)

Tabel 3 Kesenjangan Supply dan Demand Lulusan SMK dengan Peluang Kebutuhan Tenaga Kerja

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Bidang Keahlian | Lulusan SMK 2016 | Peluang Kebutuhan Tenaga Kerja | Kelebihan (+)/ Kekurangan (-) |
| 1 | Teknologi dan Rekayasa | 441.561 | 611.644 | 170,083 |
| 2 | Energi dan Pertumbuhan | 3.486 | 27.008 | 23.522 |
| 3 | Teknologi Informasi dan Komunikasi | 277.545 | 327.813 | 50.268 |
| 4 | Kesehatan dan Pekerjaan Sosial | 60.944 | 68.245 | 7.301 |
| 5 | Agribisnis dan Argoteknologi | 53.319 | 445.792 | 393.473 |
| 6 | Kemaritiman | 17.249 | 3.364.297 | 3.3470.048 |
| 7 | Bisnis dan Manajemen | 348.954 | 119.255 | -229.699 |
| 8 | Pariwisata | 82.171 | 707.600 | 625.429 |
| 9 | Seni dan Industri Kreatif | 12.017 | 88.133 | 76.116 |

Sumber: Kemendikbud

Uraian permasalahan-permasalahan pendidikan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia harus memperbaiki kualitas pendidikannya agar sesuai dengan target dari SDGs ke-4, di mana Indonesia harus menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar terutama bagi anak-anak di Indonesia. Sehingga Indonesia dapat menciptakan SDM-SDM berkualitas yang mampu bersaing, baik secara regional maupun global.

**Landasan Teori/Konsep**

**Konsep Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan**

Masalah-masalah biasa terjadi dan mengharuskan pemerintah untuk membuat suatu kebijakan untuk mengatur hal tersebut, adapun masalah publik tentu melibatkan banyak orang dan juga kelompok tertentu. (Winarno, 2007).

Menurut pandangan James Anderson kebijakan adalah suatu tindakan yang mempunyai tujuan yang dilakukan seseorang pelaku atau sejumlah pekaku untuk memecahkan suatu masalah (Parson, 2006). Pandangan lainnya dari Woll, mengatakan bahwa kebijakan publik adalah sejumlah aktivitas pemerintah untuk menyelesaikan masalah dii masyarakat baik secara langsung maupun melalui lembaga yang mempengarui masyarakat. Menurut Woll, dalam pelaksanaan kebijakan publik terdapat tiga hal yang berpengaruh sebagai implikasi dari tindakan pemerintah. Pertama, kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk kehidupan masyarakat. Kedua, adanya output dalam bentuk program untuk masyarakat. Ketiga, adanya dampak kebijakan untuk kehidupan masyarakat (Tangklisan, 2003)

Pembangunan berkelanjutan sendiri merupakan pembangunan yang tidak hanya berkepentingan untuk memenuhi kebutuhan dan bermanfaat bagi perkembangan masa sekarang namun juga harus memenuhi kebutuhan manusia dimasa mendatang. Definisi WCED (*World Commission on Environment and Development*), pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara memenuhi kebutuhan manusia. Dengan demikian, pembangunan berkelanjutan merupakan sebuah konsep yang ingin menyelaraskan pertumbuhan dan peningkatan kualitas hidup manusia, yang di dalamnya termasuk sosial dan ekonomi, dengan pemeliharaan ekosistem lingkungan (M. Fani Cahyandito, 2006)

Dari konsep di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan pembangunan berkelanjutan adalah sebuah upaya dari seorang atau banyak aktor untuk menyelesaikan suatu masalah yang dihadapi dengan tidak mengabaikan prinsip berkelanjutan dimana mampu menyelesaikan permasalahan terkait peningkatan kualitas hidup manusia dalam bidang sosial, ekonomi, dan lingkungan masa sekarang dan bermanfaat bagi masa depan.

**Konsep Kualitas Pendidikan**

Mutu/kualitas pendidikan menurut pandangan Aminatul Zahroh adalah kompetensi atau kemampuan suatu lembaga pendidikan untuk memaksimalkan serta mengatur sumber daya pendidikan yang digunakan dalam meningkatkan kemampuan belajar peserta didik/siswa secara optimal (Zahroh, 2014).

Pandangan lainnya menurut Marus Suti mutu/kualitas pendidikan merupakan derajat keunggulan dalam pengelolaan pendidikan secara efektif dan efisien untuk melahirkan keunggulan akademis dan ekstra kurikuler pada peserta didik yang dinyatakan lulus untuk satu jenjang pendidikan atau penyelesaian pembelajaran tertentu (Suti, 2011).

Dalam konteks pendidikan, pengertian mutu mengacu pada masukan, proses dan hasil. Adapun penjelasannya sebagai berikut (Fuad, 2008).

1. Mutu masukan dapat diidentifikasi dari perilaku manusia yang berada di sekolah seperti Kepala Sekolah, guru dan siswa.
2. Mutu proses adalah proses pengambilan keputusan, pengelolaan sistem dan proses belajar mengajar.
3. Mutu keluaran adalah hasil dari menjalani pendidikan semasa sekolah dan akan dipandang memiliki mutu jika capaian akademik sangat baik.

**Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian deskriptif, yaitu dengan memberikan gambaran terhadap upaya Indonesia dalam meningkatkan kulaitas pendidikan untuk mencapai target Sustainable Development Goals. Data yang digunakan adalah jenis data sekunder yang diperoleh melalui hasil telaah studi pustaka digital, baik dari buku, jurnal, laporan, dokumen, dan sumber-sumber internet yang berisi data dan informasi yang berkaitan dan berkaitan dan dapat menjelaskan fenomena yang terjadi dalam penelitian ini.

**Hasil dan Pembahasan**

1. **Upaya Kebijakan Bidang Hukum**

Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk melaksanakan SDGs dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan SDGs, termasuk dalam bidang pendidikan. Perpres tersebut memaparkan 17 target SDGs yang masuk dalam target nasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015–2019 di Indonesia. Di antara 17 poin Perpres Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, salah satu fokus utama Indonesia adalah poin terkait dengan kualitas pendidikan (Zaenal, 2017).

Terdapat beberapa poin yang menekankan kepada pentingnya membangun aspek pendidikan yang baik. Hal ini tercantum dalam Tujuan Global ke- 4 yaitu menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua. Dari 7 sasaran global SDGs poin 4, Indonesia mengadopsi 5 sasaran tersebut untuk menjadi target bagi negaranya yang terlampir dalam Perpres 59 tahun 2017.(Perpres 59/2017).

1. Sasaran Global Pertama. Pada tahun 2030, Pemerintah Indonesia menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki harus menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.
2. Pada tahun 2030, Pemerintah Indonesia menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.
3. Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas.
4. Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan
5. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.
6. **Upaya Kebijakan Program Peningkatan Akses Pendidikan**

Pemerintah mengeluarkan kebijakan program peningkatan akses pendidikan. Di mana kebijakan ini merupakan kebijakan pembangunan berkelanjutan karena pemerintah berupaya menyelesaikan masalah pendidikan yang merupakan salah satu unsur dari pilar sosial dalam pembangunan berkelanjutan yang diatur dalam target SDGs ke 4 (Kualitas Pendidikan).

1. **Program Indonesia Pintar**

Program Indonesia Pintar adalah program pemerintah berupa dana pendidikan yang diberikan langsung kepada siswa. Mereka yang menerima merupakan siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu secara ekonomi. Program ini berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 16 Tahun 2016 (Kemendikbud, 2018).

Bagi para pelajar yang sudah terdaftar dan memiliki kartu KIP akan mendapatkan manfaat besaran dana sesuai jenjang pendidikannya masing-masing seperti yang terdapat pada tabel berikut:

Tabel 4 Manfaat Program Indonesia Pintar

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Jenjang Pendidikan | Persemester | Pertahun |
| SD/MI/Paket A | Rp 225.000 | Rp 450.000 |
| SMP/MTs/Paket B | Rp 375.000 | Rp 750.000 |
| SMA/SMK/Paket C | Rp 500.000 | Rp 1.000.000 |

Sumber: Kemendikbud

Program PIP ini sebenarnya telah berjalan sejak tahun 2016 sebelum pemerintah Indonesia membuat dasar hukum pelaksanaan SDGs di Indonesia pada tahun 2017, meski demikian target dari program ini sesuai dengan target SDGs 4.1 yang intinya adalah untuk menjamin pada tahun 2030 semua anak-anak laki-laki dan perempuan untuk menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah dengan setara dan berkualitas.

Pelaksanaan PIP telah berhasil menurunkan APS (angka putus sekolah) jenjang SD dari yang awalnya pada tahun ajaran 2015/2016 sebanyak 68.066 siswa menjadi 44.516 pada tahun 2020. Sedangkan pada jenjang SMP, PIP telah berhasil membantu menurunkan APS dari yang awalnya di tahun ajaran 2015/2016 sebanyak 51.541 siswa menjadi 15.042 pada tahun 2020. (Kemendikbud, 2022)

Pada jenjang SMA, PIP juga berhasil menurunkan APS yang awalnya pada tahun ajaran 2015/2016 terdapat sejumlah 40.454 siswa menjadi 13.879 di tahun 2020. Begitu pula pada SMK, dimana PIP berhasil membantu menurunkan APS dari data awal 77.899 siswa pada tahun ajaran 2015/2016 menjadi 13.951 pada tahun 2020 (Kemendikbud, 2022).

Dilihat dari segi kualitas, dalam jangka panjang Progam Indonesia Pintar dapat membantu peningkatan mutu pendidikan di Indonesia. Hal ini dapat terjadi karena semakin banyak siswa yang aktif bersekolah maka akan mampu menghasilkan output pendidikan yang baik juga. Sehingga nantinya akan terbentuk sumber daya manusia yang dapat mendorong tumbuhnya daya saing Indonesia dalam dunia internasional.

1. **Program Pembangunan Unit Sekolah Baru**

Program USB (Unit Sekolah Baru) merupakan program bantuan langsung pemerintah kepada Dinas Pendidikan Provinsi/Lembaga Pendidikan yang ditujukan untuk pembangunan unit sekolah baru. Program USB memiliki tujuan untuk mendukung wajib belajar 12 tahun; 2. Memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP); 3. menyediakan sarana dan prasarana pendidikan Sekolah di daerah yang membutuhkan. (Kemendikbud, 2019)

Dalam pelaksanaannya program bantuan ini melibatkan berbagai unsur diantaranya Direktorat Pembinaan SD/SMP/SMA/SMK Kemendikbud, Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Tim Perencana dan Pengawas, Panitia Pengadaan peralatan dan/perabot, Tim Penerima Hasil Pekerjaan pengadaan USB dan Komite Sekolah. Keseluruh unsur tersebut memiliki perannya masing-masing dalam proses pelaksanaan program. (Kemendikbud, 2022)

Dengan adanya pembangun Sekolah sebagai salah satu sarana Pendidikan khsusnya didaerah yang memiliki APK yang rendah tentunya akan mendorong partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan sarana tersebut. Dengan demikian anak-anak usia sekolah dapat memiliki kesempatan mengakses dan menyelesaikan Pendidikan dasar dan menengah tanpa adanya kendala terkait infrastruktur Pendidikan.

Pada jenjang SD selama kurun waktu 2017-2019 ada sebanyak 38 USB dibangun diberbagai provinsi di Indonesia, sedangkan pada jenjang SMP dari 2017-2019 ada sebanyak 110 USB yang dibangun. Pada jenjang SMA 114 USB telah dibangun dalam kurun waktu 2017-2019. (Kemendikbud, 2019)

Pembangunan USB di atas memiliki pengaruh terhadap APK di Indonesia dimana APK pada tingkatan SD, walaupun mengalami sedikit penurunan dari angka 93,05 pada 2016 menjadi 89,74 pada 2019 bukan menunjukkan kinerja yang rendah. Akan tetapi justru sebaliknya, penurunan tersebut terjadi karena pada jenjang SD lebih banyak dihuni anak usia 7−12 tahun sesuai dengan Permendikbud Nomor 17 tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru. Pada jenjang SMP mengalami sedikit kenaikan dari 76,69 pada tahun 2016, menjadi 77,41 di tahun 2019. Sedangkan pada jenjang SMA mengalami peningkatan yang cukup signifkan dari yang awalnya pada tahun 2016 berada pada angka 81,95 menjadi 92,92 di tahun 2019. (Kemendikbud, 2019)

Data tersebut menunjukan bahwa pembangunan USB dapat memberikan kesempatan pendidikan bagi anak-anak usia sekolah di Indonesia. Terbukti dengan naiknya APK setelah sarana Pendidikan ditingkatkan dengan pembangunan unit-unit sekolah baru. Sehingga dengan adanya unit-unit sekolah baru, kuota peserta didik akan bertambah dan pemerataan Pendidikan akan tercipta di Indonesia. Dengan demikian, semakin banyak anak yang mendapatkan Pendidikan akan mendorong naiknya kualitas Pendidikan di Indonesia.

**3.** **Program Rehabilitasi Ruang Belajar**

Program Rehabilitas Ruang Belajar merupakan program bantuan langsung pemerintah kepada Dinas Pendidikan Provinsi/Lembaga Pendidikan yang ditujukan untuk melakukan rehabilitasi atau perbaikan ruang-ruang belajar yang rusak dan tidak layakTujuan dari program ini ialah untuk mendukung program Pendidikan Menengah Universal dalam meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan dan menuju wajib belajar 12 tahun; Memenuhi Standar Nasional Pendidikan, dan Meningkatkan mutu dan kondisi fisik sarana dan prasarana fasilitas pendidikan. sehingga dapat secara langsung mendukung proses pembelajaran di sekolah. (Kemendikbud, 2019)

Program perbaikan ruang belajar ini sudah diberlakukan oleh pemerintah bahkan sebelum adanya SDGs itu sendiri, tetapi program ini masih terus dilakukan oleh pemerintah dan juga program ini masih berhubungan dengan target SDGs 4.1 yang intinya adalah menjamin pada tahun 2030 semua anak-anak laki-laki dan perempuan untuk menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah dengan setara dan berkualitas. Tentunya penyelesaian pendidikan yang berkualitas seperti yang disebut dalam target 4.1 tidak akan tercapai tanpa adanya prasarana dan sarana pendidikan yang memadai.

Pada jenjang SD selama kurun waktu 2017-2019 sudah ada sebanyak 25.749 ruang belajar yang diperbaiki diberbagai sekolah yang tersebar diberbagai provinsi di Indonesia, sedangkan pada jenjang SMP dari 2017-2019 ada sebanyak 28.714 ruang belajar yang telah diperbaiki. Pada jenjang SMA sebanyak 8.945 ruang belajar telah direnovasi dalam kurun waktu 2017-2019. (Kemendikbud, 2019)

Dengan adanya rehabilitasi ruang belajar ini tentunya akan mendorong peningkatan pelayanan pendidikan dan meningkatkan mutu dan kondisi fisik sarana dan prasana fasilitas pendidikan, sehingga dapat secara langsung mendukung proses pembelajaran di ruang kelas. Dengan demikian peserta didik dapat menikmati proses pembelajaran tanpa adanya kendala terkait ruang kelas yang tidak/kurang memadai, dan hal tersebut akan berujung pada peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.

1. **Upaya Kebijakan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran**

Pemerintah mengeluarkan kebijakan program yang terkait dengan kualitas pengjaran dan pembelajaran. Di mana kebijakan ini adalah sebuah kebijakan pembangunan berkelanjutan karena pemerintah berupaya menyelesaikan masalah dalam pendidikan yang di mana pendidikan itu sendiri termasuk kedalam bagian dari pilar sosial dari pembangunan berkelanjutan dan menjadi target ke-4 dalam SDGs.

1. **Program Profesi Guru**

Tujuan dari program Program Profesi Guru adalah menghasilkan calon guru/guru yang mempunyai kompetensi dalam merencanakan, menjalankan, dan menilai pembelajaran; menindaklanjuti hasil dari penilaian dengan melakukan pembimbingan, dan pelatihan peserta didik dan mempu melakukan penelitian dan mengembangkan profesionalitas secara berkelanjutan.(UNEJ, 2017)

PPG berlangsung selama 2 semester, di semester pertama kegiatan akademik berupa lokakarya pengembangan perangkat pembelajaran, presentasi hasil pengembangan perangkat pembelajaran, dan peerteaching (tutor sebaya), serta pendalaman atau penguatan materi bidang studi/keahlian. Kegiatan akademik semester kedua berupa PPL (Praktik Pengalaman Lapangan), Penelitian Tindakan Kelas, dan bagi PPG kejuruan ada kegiatan praktik di industri.(UNEJ, 2017)

Program PPG diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi persyaratan dan memperoleh ijin yang ditetapkan oleh Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Pada tahun 2019, terdapat 63 Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan PPG. Sedangkan pada tahun 2022 sudah terdapat sebanyak 75 Perguruan tinggi yang menyelenggarakan PPG dan Perguruan tinggi tersebut tersebar di hampir seluruh provinsi yang ada di Indonesia.(Tirto, 2022)

PPG atau Program Profesi Guru sebenarnya sudah berjalan sebelum adanya payung hukum pelaksanaan SDGs di Indonesia, tetapi program ini masih berhubungan dengan target SDGs 4.1 dimana di poin tersebut menjamin penyelesaian pendidikan dasar sampai jenjang menengah bagi anak-anak dengan setara dan berkualitas. Dimana kualitas disini tentunya tidak dapat dipisahkan dari peranan guru yang professional dalam menjalankan tugasnya.

PPG dapat membantu meningkatkan kemampuan guru sehingga akan membentuk guru-guru yang professional dan berkualitas. Berikut adalah tabel yang menunjukan kemampuan guru sebelum dan sesudah mengikuti PPG:

Tabel 5 Kemampuan Guru Sebelum dan Sesudah Mengikuti PPG

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Jenis kemampuan | Sebelum | Sesudah |
| Memahami dan menguasai bahan ajar | 48,33 | 91,66 |
| Merencanakan dan mengembangkan program pengajaran | 28,22 | 78,02 |
| Mengaktualisasikan PBM yang produktif | 46,48 | 94,62 |
| Memahami dan menggunakan prinsip-prinsip belajar | 41,66 | 93,33 |
| Menilai proses hasil belajar siswa | 43,33 | 95 |
| Rata-rata | 41,40 | 90,52 |

Halimah, 2010

Tabel tersebut menunjukan perbedaan yang signifikan terhadap perkembangan dan kompetensi atau kemampuan guru sebelum dan sudah melalui PPG. Dalam meningkatkan mutu pendidikan kualitas guru berbanding lurus dengan mutu Pendidikan. Semakin baik kualitas atau kompetensi guru akan semakin baik pula kualitas Pendidikan. Dengan demikian dapat disimpulkan melalui PPG ini akan lahir tenaga pendidik yang professional sehingga dapat meningkatkan kualitas Pendidikan di Indonesia.

1. **Gerakan Literasi Sekolah**

Gerakan Literasi Sekolah merupakan suatu usaha atau kegiatan yang bersifat partisipatif dengan melibatkan warga sekolah (peserta didik, guru, kepala sekolah, tenaga kependidikan, pengawas sekolah, Komite Sekolah, orang tua/wali murid peserta didik), akademisi, penerbit, media massa, masyarakat (tokoh masyarakat yang dapat merepresentasikan keteladanan, dunia usaha, dll.), dan pemangku kepentingan di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (Kemendikbud, 2018)

Kegiatan GLS ditujukan bagi pemantapan Kurikulum 2013 bagi semua mata pelajaran dengan menerapkan strategi literasi dalam pembelajaran dengan merujuk pada HOTS (*higher order thinking skills*), atau keterampilan bernalar tingkat tinggi, kompetensi abad 21 (kemampuan berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif), dan penguatan pendidikan karakter. (Kemendikbud, 2018)

Pelaksana program atau gerakan ini ialah TLS (Tim Literasi Sekolah) yang terdiri dari seluruh komponen warga sekolah yang tergabung dalam Tim di bawah koordinasi kepala sekolah dan dikuatkan dengan SK kepala sekolah. TLS memiliki tugas untuk membuat perencanaan, pelaksanaan, dan asesmen program. TLS harus dapat memastikan terciptanya suasana akademis yang kondusif, yang mampu membuat seluruh anggota komunitas sekolah antusias untuk belajar. (Kemendikbud, 2018)

Gerakan Literasi Sekolah merupakan program yang sudah berjalan dari tahun 2016 sebelum terbentuknya payung hukum SDGs di Indonesia, tetapi program ini terus berjalan dan memiliki target yang sejalan seperti target SDGs 4.5 yang berbunyi “Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi”.

Dengan dijalankannya GLS akan mendorong peningkatan *higher order thinking skills*, atau keterampilan bernalar tingkat tinggi, sebuah keterampilan yang sangat penting pada kompetensi abad 21 seperti kemampuan berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Dengan meningkatnya keterampilan tadi tentunya akan membantu peserta didik dalam proses belajar dan hal tersebut akan berujung pada sebuah output berupa meningkatnya kualitas Pendidikan di Indonesia.

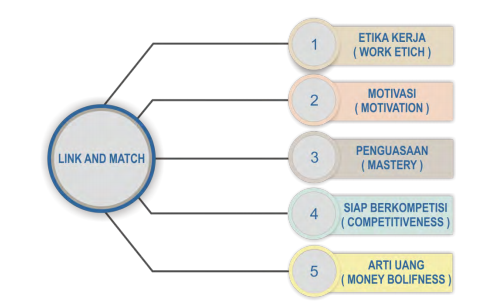
1. **Upaya Kebijakan Keterampilan, Vokasi, dan Kemampuan Kerja**

Pemerintah mengeluarkan kebijakan program terkait pendidikan. Di mana kebijakan ini merupakan kebijakan pembangunan berkelanjutan karena pemerintah berupaya menyelesaikan masalah di bidang pendidikan yang merupakan salah satu bagian dari pilar sosial dalam pembangunan berkelanjutan yang di mana pendidikan menjadi target SDGs ke 4 (Kualitas Pendidikan)

1. **Program Revitalisasi SMK**

Program Revitalisasi SMK berawal dari Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan, dalam Inpres tersebut menginstruksikan kepada seluruh instansi pemerintah yang membidangi sekolah menengah kejuruan di Indonesia untuk melakukan pembenahan sistem pendidikan dan pelatihan kejuruan dengan mempertimbangkan kebutuhan pasar. Dalam instruksi Presiden, revitalisasi sekolah kejuruan merupakan salah satu langkah konkrit untuk meningkatkan kualitas SDM di Indonesia dalam menghadapi perubahan dunia di era revolusi industri keempat yang menuntut pemanfaatan teknologi. (Kemendikbud, 2018)

Kelanjutan Inpres No. 9 Tahun 2016. Mendikbud secara tegas menginstruksikan untuk meningkatkan dan menstandardisasi program SMK sesuai dengan kebutuhan kompetensi lulusan (*link and match*). “Link” dan “match” mengisyaratkan agar para lulusan mempunyai wawasan persaingan atau sikap etos kerja (work ethic), pencapaian motivasi (*achievement motivation*), penguasaan (*mastery*), sikap berkompetisi (*competitiveness*), memahami arti uang (*money beliefs*), dan sikap menabung (*attitudes to saving*). “*Link*” dan “*match*” memerlukan perubahan pola pikir seluruh penyelenggara pendidikan, baik lembaga pendidikan maupun tenaga pengajar, agar aktif mengembangkan “*link*” dan “*match*” dengan dunia kerja. (Kemendikbud, 2018)

Gambar 1 Skema “link” dan “match” Revitalisasi SMK

Sumber: Kemendikbud

Terdapat sepuluh langkah program yang dilakukan oleh program revitalisasi SMK ini. Berikut ini adalah Kesepuluh langkah program revitalisasi SMK di Indonesia:

1. Revitalisasi sumber daya manusia
2. Membangun Sistem Informasi Sekolah SAS berbasis Sistem Informasi Manajemen
3. *Link and match* dengan industri
4. Kurikulum berbasis industri
5. *Teaching factory*
6. Penggunaan Media Video Tutorial dan Portofolio Berbasis Video e-Report Skill
7. Uji Sertifikasi Profesi
8. Pemenuhan sarana dan prasarana
9. Mengembangkan Kearifan Lokal
10. Peran SMK Sebagai Penggerak Ekonomi Lokal.

Program Revitalisasi SMK ini jika dilihat dari dasar hukum pelaksanaanya tidak secara langsung dilakukan oleh pemerintah untuk memenuhi target dari SDGs, tetapi program ini masih sejalan dengan target SDGs 4.3 yang berbunyi “Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas.”

Dari aspek akses, program revitalisasi SMK melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah membangun 277 unit sekolah baru, 6478 ruang kelas baru, dan 3.393 ruang praktik kejuruan di seluruh Indonesia. Dari aspek kompetensi guru, sebanyak 92 guru telah memperoleh sertifikasi internasional, 1.600 guru telah mengikuti sertifikasi keterampilan, 1.170 guru telah mengikuti tahap proyek keterampilan ganda, dan 10.366 guru telah mengikuti ujian sertifikasi kemampuan kerja. Dalam hal peningkatan akses sertifikasi lulusan SMK dan akreditasi SMK, Kemendikbud telah mensertifikasi 73 kompetensi keahlian. Totalnya, hingga akhir tahun 2020, terdapat 2.600 SMK yang telah direvitalisasi. (Kemendikbud, 2021)

Rangkaian hasil program-program dalam Revitalisasi SMK tersebut akan menjadi input yang penting dalam dunia pendidikan. Dengan demikian dengan dijalankannya program ini, akan berujung meningkatnya kemampuan vokasi peserta didik dan hal tersebut akan sejalan dengan meningkatnya kualitas Pendidikan di Indonesia.

**Kesimpulan**

Indonesia dihadapkan pada berbagai permasalahan yang berhubungan dengan pendidikan, mulai dari kualitas tenaga pengajar hingga daya saing yang rendah diantara para lulusan. Melihat fakta ini, Indonesia mengambil salah satu jalan guna meningkatkan kualitas pendidikan dalam negeri, yakni dengan menerapkan SDGs (*Sustainable Development Goals*) yang merupakan lanjutan dari program MDGs (*Millenium Development Goals*), yaitu sebuah agenda hasil kesepakatan anggota – anggota PBB di mana salah satu poin utamanya berfokus pada kualitas pendidikan.

Sebelum menerapkan SDGs, Indonesia telah mengeluarkan kebijakan pendidikan berupa program-program sebagai upaya untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan. Meski demikian, program-program tersebut sejalan dengan tujuan SDGs yang terdapat pada poin keempat. Oleh sebab itu, program yang disusun untuk peningkatan kualitas pendidikan tersebut terus berlanjut agar kualitas pendidikan Indonesia dapat mencapai target yang ditetapkan SDGs. Pemerintah telah melakukan upaya dengan membuat kebijakan bidang hukum, upaya kebijakan program peningkatan akses pendidikan, upaya kebijakan program kualitas pengajaran dan pembelajaran dan upaya kebijakan program keterampilan, vokasi, dan kemampuan kerja.

**Daftar Pustaka**

Aminatul Zahroh. 2014. Total Quality Management Teori & Praktik Manajemen Untuk Mendongkrak Mutu Pendidikan Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.

Bappenas. Sekilas SDGs. Terdapat di <https://sdgs.bappenas.go.id/sekilas-sdgs/>.

Bruns, Barbara, Macdonald, I. H., & Schneider, B. R. 2019. The Politics of quality reforms and the challenges for SDGs in Education. World Development, 27-38. Terdapat di <https://www.researchgate.net/publication/332100069_The_politics_of_quality_reformsand_the_challenges_for_SDGs_in_education>

Fuad, Choirul. 2008. Budaya sekolah dan Mutu Pendidikan, Jakarta: PT. Pena Citrasatria

Halimah. 2010. Pengaruh Peningkatan Profesional Guru SD dalam Bidang Studi Ips di kecamatan rajapolah tasikmalaya. Saung Guru, 1(10), 2038

Hesel Nogi S. Tangkilisan. 2003. Kebijakan Publik yang Membumi: Konsep, Strategi dan Kasus Yogyakarta: Lukman Offset dan YPASI

Human Development Report. 2019. Terdapat di <http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2019.pdf>

James Anderson. 1979. Public Policy Making. New York: Holt, Richard & Winstron.

Kemendikbud. 2017. Strategi Implementasi Revitalisasi Smk. Terdapat di <http://repositori.kemdikbud.go.id/5263/1/riXIT33kky7AMpjt8Qcz96oWg1ef5ixukA8vozns.pdf>

Kemendikbud. 2018. Kajian Program Indonesia Pintar. Terdapat di <http://repositori.kemdikbud.go.id/15823/1/Kajian%20program%20Ind%20Pintar.pdf>

Kemendikbud. 2019. Laporan Kinerja Kemendikbud 2018. Terdapat di <https://kemdikbud.go.id/main/files/download/9899b657b50db1a>

Kemendikbud. 2019. Ketersediaan Sarana dan Prasaran Pendidikan di Daerah 3T. Terdapat di <https://puslitjakdikbud.kemdikbud.go.id/assets_front/images/produk/1-gtk/buku/15__Yaya_Jakaria_Kajian_Sarpras_A5_Boni_Gen_imelda_final.pdf>

Kemendikbud. 2019. Rehabilitasi Ruang Belajar SMA, terdapat di <https://sma.kemdikbud.go.id/data/files/Sarana%20Prasarana%20-%20PEDOMAN%20REHABILITASI%20BANGUNAN%20APBNP%202019.pdf>

Kemendikbud. 2019. Unit Sekolah Baru SMA. Terdapat di <http://repositori.kemdikbud.go.id/17821/1/Sarana%20Prasarana%20%2820191216%29%20-%20Pedoman%20Pelaksanaan%20Banper%20USB%20SMA%20Tahun%202019.pdf>

M. Fani Cahyandito. Pembangunan Berkelanjutan, Ekonomi Dan Ekologi, Sustainability. Terdapat di <http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2009/06/jurnal_lmfe_pemb_berkelanjutan-ekonomiekologi-sust_comm-sust_rep_fani.pdf>

Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru, 2017, terdpat di <https://ppg.fkip.unej.ac.id/wp-content/uploads/sites/30/2017/10/pedoman-ppg-reguler-v1.02.pdf>

Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

PERPRES Nomor 59 Tahun 2017. Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Potret Capaian Program Revitalisasi SMK Saat Ini. 2021. Terdapat di <https://jendela.kemdikbud.go.id/v2/fokus/detail/potret-capaian-program-revitalisasi-smk-saat-ini>

Sabon, Simon. 2017. Persepsi Siswa Terhadap Kompetensi Guru yang Sudah dan Belum Disertifikasi. Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan 2(1), 55-80.

Statistik Pendidikan. 2022. terdapat di <https://statistik.data.kemdikbud.go.id>

Strategi Implementasi Revitalisasi Smk. 2017. Terdapat di <http://repositori.kemdikbud.go.id/5263/1/riXIT33kky7AMpjt8Qcz96oWg1ef5ixukA8vozns>.

Suti, Marus. 2011. “Strategi Peningkatan Mutu Di Era Otonomi Pendidikan”, MEDTEK, Vol. 3 No. 2.

The Global Education Monitoring Report. 2016. Terdapat di <https://en.unesco.org/gem-report/>

United Nations, The Universal Declaration of Human Rights. Terdapat di <http://www.un.org/en/udhrbook/pdf/udhr_booklet_en_web.pdf>

Wayne Parsons, 2006 Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan (Jakarta: Kencana, 2006).

Winarno, Budi. 2007. Kebijakan Publik: Teori & Proses Yogyakarta: Media Presindo.

Zaenal. 2017. “Inilah Perpres Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan SDGs”. Terdapat di https://setkab.go.id/inilah-perpres- pelaksanaan-pencapaian-tujuan-pembangunan-berkelanjutan-sdgs/

1. Mahasiswa Program S1 Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. E-mail: maulanaamalik97@gmail.com [↑](#footnote-ref-1)